

Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam

Mohammad Syawaludin ^{1,*} , M. Sirajudin Fikri ² , and Yulion Zalpa ² 

¹ Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 30126 Palembang, Indonesia

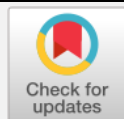
² Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 30126 Palembang, Indonesia

* Korespondensi: mohammadsyawaludin_uin@radenfatah.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Studi Pustaka



Sitasi Cantuman:

Syawaludin, M., Fikri, M. S., & Zalpa, Y. (2019). Malay Political Tradition: The Appointment and Succession Analysis of The Sultanate of Palembang Darussalam. *Society*, 7(2), 213-232.

DOI : [10.33019/society.v7i2.108](https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108)

Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 31 Oktober, 2019;

Diterima: 26 Desember, 2019;

Dipublikasi: 31 Desember, 2019;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana Islam dan Melayu sebagai entitas yang saling terkait mempengaruhi pembentukan lembaga-lembaga politik di Kesultanan Palembang, terutama yang mempengaruhi pengangkatan dan suksesi Sultan. Penelitian ini adalah hasil penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan literatur menggunakan teknik analisis interpretatif. Dalam praktik Islam di Indonesia, nilai-nilai budaya agama-agama non-Islam dipertahankan dan dipraktikkan oleh entitas Islam seperti praktik-praktik pergantian Raja dan Sultan. Melalui pendekatan teoretis tentang masyarakat sosial dengan melihat evolusi raja-raja yang dijadikan pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan dan peralihan kekuasaan, dipadukan dengan *Elite; Political Culture, dan Cultural Politics*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengangkatan dan pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang, yaitu adanya karakteristik yang terkait dengan perpaduan budaya Melayu dan Jawa. Perbedaan budaya politik sangat mempengaruhi proses suksesi yang terjadi. Budaya Melayu yang lebih menekankan pada perekonomian di bidang maritim dan simbol-simbol Arab akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih agraris dan sinkretis.

Kata Kunci: Budaya Melayu; Islam; Kesultanan; Palembang; Suksesi

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan kajian tentang Islam, Melayu dan tradisi lokal sering dilihat sebagai dua hal yang saling memberi warna didalam terbentuknya formasi sosial khususnya di Indonesia. Islam sebagai agama yang didalamnya mengajarkan berbagai aspek normatif dan humanis tentunya mengalami proses penerimaan dan penolakan dalam masyarakat, sebaliknya Melayu dan tradisi sebagai suatu identitas masyarakat tertentu juga mengalami proses dialektik dalam membangun penyesuaian dengan ajaran keislaman.

Tidak berlebihan bila antara Islam, Melayu dan tradisi lokal selalu dikaji dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang umumnya berbasis ideografik. Ini membuktikan perjumpaan Islam, Melayu dan tradisi lokal tidak saja dipahami sebagai suatu proses ajaran tapi mampu menciptakan intitusi sosial, budaya, ekonomi bahkan intitusi kekuasaan politik yang mentolerir nilai-nilai lokal. Dalam lingkaran tersebut Islam, Melayu, dan tradisi lokal menjadi *magnetum* yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perubahan yang terjadi. Lebih jauh membentuk formasi sosial lebih luas dan dominan.

Bila dikaitkan dengan "Melayu", maka tidaklah identik dengan komunitas etnik atau suku bangsa tertentu. Melayu sesungguhnya entitas yang bersifat fleksibel dan semirip bangsa bahkan kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Didalamnya ikut melebur penduduk keturunan asing seperti Arab, Persia, Cina dan India, disamping keturunan dari etnik Nusantara lain. Adaptasi dan diikuti dengan proses defusi bisa terjadi karena ada faktor migrasi dan proses mukim yang menjadikan mereka hidup lama bersama orang Melayu dan suku lokal, sisi lain adanya memeluk agama yang sama serta menggunakan bahasa Melayu dalam penuturan sehari-hari.

Inilah yang menyebabkan orang Melayu memiliki kekhasannya tersendiri, tidak seperti budaya yang berasal dari orang Jawa, Sunda, atau Betawi. Orang Melayu tinggal di beberapa wilayah yang terpisah, baik di daratan maupun perairan, bahkan di antaranya saling berjauhan. Namun demikian di mana pun berada, bahasa dan agama mereka sama justru menjadi *core culture* identitas utama Melayu. Ada beberapa faktor mengapa proses tersebut bisa membentuk struktur dan fungsional "Melayu" khas dari suku Indonesia lainnya antara lain:

- 1) Perdagangan dan Pelabuhan yang menjadi pintu masuk berbagai aktivitas baik terkait dengan perniagaan maupun relasi kekuasaan.
- 2) Perkawinan antara antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi yang kemudian membetuk kekerabatan baru di antara keluarga.
- 3) Ekspansi kekuasaan Politik dan mulai berkurangnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha.
- 4) Mulai diterimanya ajaran Islam ortodoksi maupun hetordoksi yang ditandai dengan hadirnya ulama sufi dan fiqh.
- 5) Terjadinya proses pengislaman raja-raja pribumi oleh para ulama sufi atau ahli tasawuf.
- 6) Bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran Islam dan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Islam baik secara lisan maupun tulisan (Arab Melayu dengan berbagai jenisnya).
- 7) Entitas sufi dan ulama mulai membangun tradisi intelektual baru di lingkungan kerajaan-kerajaan bahkan ada yang menjadi penasehat Raja atau sultan.

Semua faktor tersebut menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sulit untuk mengatakan bahwa tradisi lokal tidak identik dengan Islam atau sebaliknya Islam adalah yang membentuk wujud tradisi lokal kekuasaan. Karena itu, dalam praktik Islam di Indonesia bisa ditemukan nilai budaya dari agama bukan Islam yang

dipelihara dan dipraktikan oleh entitas Islam seperti praktik-praktik dalam pergantian kekuasaan Raja dan Sultan.

Dalam mengkaji sistem pengangkatan dan pemberhentian raja atau sultan tidak dapat dipisahkan dari persoalan intitusi sosial dan politik yang hadir di tengah tengah kekuasaan seperti keturunan, kepercayaan, istana dan lain sebagainya. Kehadiran wujud kekuasaan tradisional dengan sejumlah konsep yang ada dalam kekuasaan itu sendiri, sesuai dengan kebudayaan politik yang dianut dan menentukan suatu proses suksesi raja atau sultan terjadi di masa itu. Titik peleburannya adalah bertemu dua tradisi besar Hindu Budha dan Melayu dalam proses penciptaan tradis raja-raja dan sultan.

2. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian Horikoshi & Wahid (1986: 76-78), menegaskan bahwa sifat kepemimpinan sesungguhnya dapat dibangun melalui proses sosial, yaitu interaksi ketauladanan dan ketokohan yang terjadi antara tokoh-tokoh agama mempengaruhi pengikut di bawahnya, selanjutnya respon pengikut terhadap kualitas-kualitas yang diinginkannya. Fenomena kharismatik ini hanya terjadi pada suatu interaksi sosial yang diprakarsai oleh penampilan tokoh yang mempunyai kemampuan inheren, terpelajar dan disiplin.

Hasil penelitian Syamsudin (2001: 56-58), berpandangan bahwa hubungan Islam dan Kepemimpinan merupakan wacana klasik yang terus berkembang. Pertengahan abad 20 negara-negara Islam mengalami kesulitan didalam mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara Islam dan Kepemimpinan, kenyataan menjelaskan memang dibanyak negara Islam belum mampu menunjukkan hubungan yang harmonis antar Islam dan Kepemimpinan modern. Dalam penelitiannya, Syamsudin juga mengelaborasi secara tajam berbagai paradigma pemikiran kepemimpinan Islam dan politik di Indonesia.

Hasil penelitian al-Attas (1999: 77-79), datangnya Islam menyebabkan kebangkitan rasional dan intelektual yang bercorak religius di Nusantara yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kecuali itu, Islam juga mendorong terjadinya perubahan besar dalam jiwa bangsa Melayu dan kebudayaannya. Islam menyuburkan kegiatan ilmu dan intelektual serta membebaskan mereka dari belenggu mitologi yang menguasai jiwa mereka sebelumnya. Hadirnya Islam membuka lembaran baru dan menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang sangat mendasar. Lebih jauh lagi dalam masyarakat terjadi proses pembentukan Islam ke dalam wajah institusi kekuasaan di seputar kerajaan yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh peradaban Melayu dan lokal. Dari Pasai dan Aceh, Islam kemudian tersebar ke wilayah-wilayah lain di kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun bermunculan di pulau-pulau lain sejak abad ke-16 Masehi setelah penguasa setempat memeluk agama Islam dan kerajaannya terlibat dalam kegiatan perdagangan regional.

Hasil penelitian Ambarly (1998: 33-35) di Jawa muncul kerajaan Demak, Banten, Pajang, Mataram, Cirebon dan Madura pada abad ke-16 dan 17 Masehi; di Maluku muncul kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-16 Masehi; di Sulawesi muncul kerajaan di Buton, Selayar dan Gowa, di Nusatenggara muncul kerajaan di Bima dan Lombok, di Kalimantan muncul kerajaan di Banjarmasin dan Pontianak, dan seterusnya pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Melayu sendiri pusat-pusat kekuasaan dan peradaban Islam yang lain juga muncul menyusul kemunduran Aceh Darussalam sejak awal abad ke-18 Masehi, misalnya Palembang, Johor, Riau, Banjarmasin, Minangkabau, dan lain-lain.

Abdullah (2002: 7-8) Faktor penting lain yang menyebabkan Islam berkembang pesat ialah penempatan pusat-pusat lingkaran peradaban di tiga titik yang tepat, yaitu Istana, Pesantren dan Pasar (Abdullah, 1988, dalam Fadil, 1991). Istana sebagai pusat kekuasaan berperan di

bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan.

Kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Pesantren berperan di bidang pendidikan, dan merupakan pusat kebudayaan kedua setelah istana. Proses pergantian raja di Palembang baru ditemukan rujukannya pada salah satu naskah kuna "Hikayat Palembang" (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda.

Leur (1955: 97-99) dalam pernyataan laporan hasil disertasinya yang membahas pengaruh Hindu dan Islam serta Barat dalam sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia lama. Masih menurut Leur bahwa penyebaran dan perkembangan Islam berkaitan langsung dengan pelayaran internasional, karena para pedagang Islam juga pendakwah, Akan tetapi penerimaan Islam tidak terjadi dengan paksaan dari luar atau karena adanya daya tarik dari sistem budaya yang lebih tinggi yang masuk ke dalam sistem kekuasaan local.

Berdasarkan berbagai temuan dan kajian di atas, dapat dikatakan bahwa pengaruh Islam, Melayu dan tradisi lokal, sesungguhnya turut membentuk proses konversi suksesi raja-raja dan sultan-sultan di Nusantara, termasuk kesultanan Palembang. Hanya saja perlu memilah dalam hal pelebagaan kekuasaan terkait dengan pergantian sultan, pemberian gelar yang dikaitkan dengan agama umpamanya yang digunakan oleh raja-raja Mataram memakai gelar *Panembahan*, *Susuhunan* (*susuhunan*) atau *Sultan* dan pemakaian gelar *Sayidin Panatagama* seperti tampak pada rentetan gelar yang dipakai oleh *Susuhunan*, raja-raja Surakarta, demikian pula oleh sultan, raja-raja Yogyakarta, menunjukkan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar *khalifatullah* seperti terlihat pada rentetan gelar sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedudukan raja.

Berbagai konstruksi teori dan hasil penelitian terdahulu terhadap sistem pengangkatan dan pergantian Raja atau Sultan di Nusantara selalu menyangkut masalah budaya dan pelebagaan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Islam, Melayu dan tradisi lokal. Karenanya analisis sosiologis melalui teori *patron client* dan kharismatik dipakai untuk mengupas sistem politik, yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisional, patrionalisme, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya, sebab ranah Raja dan Sultan masuk dalam kajian sejarah klasik yang bercirikan nilai-nilai simbolis dalam masyarakat yang memiliki tipe kepemimpinan berbasis *genealogic-hereditically* (keturunan) dan kharismatik.

Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi lebih lanjut hal-hal lain yang belum menjadi fokus peneliti sebelumnya dalam legitimasi pemimpin atau raja, yang terletak pada nilai-nilai tradisi, yang membentuk pemimpin karismatik baik dari keturunan atau simbol yang ada.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini berusaha menyibakkan dinamika perubahan sosial, politik, budaya dari proses Islamisasi dan proses institusional serta proses sosiokultural Islam dan Melayu pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk mempertajam studi ini, maka akan dilakukan pengambilan tema tertentu dari sejarah Kesultanan Palembang Darussalam diantaranya proses terbentuknya Kerajaan Palembang dan mulai digunakannya kata *Kesultanan*, Tradisi Politik Suksesi Kesultanan Palembang, Ulama Kesultanan, pola terbentuknya entitas Muslim Arab dan Muslim Melayu, munculnya strategi penyesuaian Arab dan Pribumi, serta terbentuknya institusi politik dari kerajaan ke kesultanan.

Pemahaman sosiologis dan sejarah terkait semua pengalaman sejarah maupun historiografi menjadi sangat penting. Sebab ekspresi dari ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, sistem organisasi, sistem sosial dan sistem budaya yang menggerakkan pengalaman sejarah yang lainnya, terutama proses islamisasi yang berlangsung bersamaan dengan perluasan aktivitas perdagangan yang tidak dapat dipisahkan dari munculnya pusat perekonomian baru di kerajaan lokal yang memiliki ciri keislaman yang kuat. Keberadaan jaringan sosial keagamaan dan ekonomi ini sangat penting bagi kelangsungan peran dan fungsi kaum Muslim dalam aktivitas perdagangan dan hubungan dengan peran kerajaan lokal.

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui dua sumber yakni:

- 1) Sumber-sumber kepustakaan dan dokumenter sebagai data primer.
- 2) Sumber-sumber lapangan sebagai data sekunder digunakan sebagai sumber informasi komplementer.

Sumber data kepustakaan dan dokumenter dicari melalui teknik observasi dan kajian dokumentasi. baik buku maupun literasi lainnya yakni; Islamisasi, *wong* Arab dan pribumisasi, Sejarah Palembang, Sejarah Kesultanan Palembang dan terbentuknya pola pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam, seperti (1) Rahim (1998), "*Sistem Otoritas & Administrasi Islam Studi Tentang pejabat Agama Masa kesultanan dan Kolonial di Palembang*"; (2) Resink (1987), "*Raja dan Kerajaan yang merdeka di Indonesia, 1850-1910*"; (3) Riklefs (1990), "*Sejarah Indonesia Modern*". (4) Saleh (1999), "*Mitos dan Legenda dalam Konsep Kerajaan dan Kenegaraan Melayu Tradisional*", dalam Hashim & Perret (1999); (5) Wolders (1975), "*Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*"; (6) Azra (2002), "*Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*"; (7) Berg (1989), "*Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*", terjemahan Rahayu Hidayat; (8) Hanafiah (1987), "*Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*"; (9) Sevenhoven (1971), "*Lukisan tentang Ibukota Palembang*", diterjemahkan oleh Sugarda Purbakawatja; (10) Zuhdi (1996), "*Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*"; (11) Ali (1986), "*Refleksi 'Paham Kekuasaan Jawa' Dalam Indonesia Modern*". (12) Hasymy (1993), "*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*"; (13) Leornard (1987), "*Persekutuan Aneh Pemukim Cina, Peranakan dan Belanda di Batavia VOC*" (diterjemahkan); (14) Budi (2005), "*A Study on the History and Development of the Javanese Mosque: Part 2: The Historical Setting and Role of the Javanese Mosque under the Sultanates*".

Sementara data sekunder dari lapangan digali melalui teknik wawancara dengan informan. Teknik ini digunakan untuk lebih memahami interpretasi kohensi terhadap berbagai data sejarah yang ditemukan. Hasilnya berupa gambaran kronologi, rekonstruksi dan kesimpulan yang kuat terhadap subjek penelitian.

Dalam memahami berbagai keadaan yang mengendap pada hubungan-hubungan sosial, konflik dan dinamika formasi kekuasaan seperti status, peran, nilai, norma, pengetahuan, gagasan, serta simbol, yang mendeskripsikan peristiwa, maka akan digunakan analisis interpretasi. Analisis ini merupakan metode dalam *cultural science* untuk menghasilkan *scientific knowledge of an objectivity*. Penelitian ini mencoba menengahkan dimensi-dimensi yang terabaikan ke dalam analisis sosiologi yakni analisis aspek-aspek sosial, budaya, dan material dengan memahami makna sesuai situasi historis atau sosial yang melihat *social cultur world* (lingkungan sosial kultur) sebagai suatu fenomena yang dibentuk oleh manusia. Fokus analisis ini terletak pada apa yang disebut *shared meaning* (pemaknaan berbagai hal) dalam suatu proses sosial. Hal ini diharapkan dapat menjelaskan kebermaknaan berbagai kondisi dan hubungan yang ada dan secara implisit menciptakan konflik dan akan diperoleh makna sebenarnya (*the deepest insights*) tentang tindakan-tindakan yang terjadi pada relasi sosial.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo (2002: 7-8) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Patton (dalam Sutopo, 2002:78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda, (2) triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, (3) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti, dan (4) triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Dalam konteks, penelitian ini mengumpulkan data yang relevan terkait budaya politik melayu kemudian mengelompokkan berdasarkan metode yang digunakan, menginventarisasi kesimpulan terkait literatur yang ada yang pada akhirnya diuji dengan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan yang utuh.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Suksesi Raja dan Sultan Palembang Darussalam

Sistem pergantian raja-raja yang ada di Indonesia tampaknya sudah dibakukan sedemikian rupa dalam bentuk tradisi dan adat masing-masing. Meskipun demikian, sejarah juga mencatat seringnya terjadi konflik di antara para elit kerajaan pada saat proses pergantian raja. Apalagi jika raja yang memerintah sebelumnya tidak menunjuk calon penggantinya atau belum mengangkat putra mahkota. Intrik di antara para pangeran seringkali mewarnai proses pergantian raja, yang tidak jarang berbuntut pada kematian salah satu diantaranya. Hal seperti itu juga berlaku untuk kerajaan atau Kesultanan Palembang Darussalam. Proses pergantian raja-raja dan sultan di Palembang dapat dilihat dalam buku "Het Sultanaat Palembang" yang disusun oleh Woelders berdasarkan beberapa naskah yang disimpan di Leiden, Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1, TR-3 dan Teks KI-4 (Woelders, 1975).

Susunan raja-raja dan para sultan yang memerintah di Palembang juga termuat pada tabel 1 yang disusun oleh Husni Rahim dengan mengacu pada berbagai sumber (Rahim, 1998). Dari susunan tersebut terlihat adanya perbedaan, karena tabel yang dibuat oleh Husni Rahim dirunut mulai dari Aria Dilah, sementara yang lainnya dimulai dari Ki Gede Ing Suro. Namun dari naskah-naskah lama yang disusun oleh Woelders tampak juga adanya perbedaan, utamanya dalam masa kekuasaan para raja dan sultan saat memerintah. Meskipun demikian, naskah-naskah itu semuanya mencantumkan nama Ki Gede Ing Suro sebagai penguasa pertama di Palembang. Meskipun sebagai cikal bakal genealogi tidak selalu sama. Teks UBL - 6 (*Kitab Toeroenan Radja-radja di dalam negeri Palembang*), misalnya menyebutkan bahwa genealogi raja-raja Palembang dimulai dari Sayyidina Husin.

Perbedaan lama kekuasaan atau tahun masa kekuasaan para raja dan sultan yang memerintah, tentunya dapat dikaitkan dengan masa penulisan naskah-naskah tersebut yang semuanya berasal dari setelah Kesultanan Palembang dihapuskan. Teks UBL 4 - 6 ditulis pada tahun 1851; sementara teks UBL - 7 ditulis antara tahun 1863-1880 (Woelders, 1975). Mengenai

proses pergantian kekuasaan di Palembang sejak masa pemerintahan Ki Gede Ing Suro Tua sampai dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1823. Dalam naskah-naskah kuna Palembang yang terangkum dalam buku "Het Sultanaat Palembang" dan tradisi lisan masyarakat Palembang diketahui bahwa yang berkuasa di Palembang pertama kali ialah Ki Gede Ing Suro Tua. Menurut kajian Graff & Pigeaud, Ki Gede Ing Suro Tua dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede Ing Suro Tua merupakan salah satu pelarian dari Jipang yang kemudian memegang pemerintahan di Palembang pada tahun 1541.

Angka tahun ini diperoleh Graff & Pigeaud berdasarkan catatan de Kock (Graff & Pigeaud, 2001: 337). Hal ini berbeda dengan catatan Sturler yang menyebut angka tahun 1549 sebagai angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Suro Tua di Palembang (Sturler, 1843). Angka tahun ini ternyata disetujui oleh Graff & Pigeaud, karena pada tahun 1541 Sultan Trenggono masih berkuasa di Demak. Terlepas dari perbedaan angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Suro tersebut, yang jelas tokoh ini tidak pernah dimakamkan di Palembang, karena ia meninggal saat dalam pelayaran kembali ke Jawa. Menurut Husni Rahim masa kekuasaan Ki Gede Ing Suro selama 21 tahun. Husni Rahim juga menyebutkan bahwa sebelum Ki Gede Ing Suro pernah berkuasa Pangeran Sido Ing Lautan yang masa kekuasaannya berlangsung selama 5 tahun. Sementara menurut teks TR-1 masa kekuasaannya adalah 22 tahun.

Jika melihat masa kekuasaannya yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa itu kondisi Palembang stabil. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika sebelum kembali ke Jawa, dia sudah memberi mandat kepada saudaranya, Ki Gede Ing Suro Muda untuk melaksanakan pemerintahan di Palembang. Tokoh ini memerintah Palembang sejak tahun 1572-1589 atau selama 17 tahun. Angka tahun yang disebutkan oleh Husni Rahim ini ternyata berbeda dengan yang terdapat dalam teks TR-1, karena menyebutkan masa kekuasaannya hanya satu tahun, yaitu mulai tahun 968 Hijriah. Ki Gede Ing Suro Muda inilah yang kemungkinan membangun kompleks pemakaman di Gedingsuro. Tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Ilir atau Kiai Mas Anom Adipati Ing Suro. Jika Ki Gede Ing Suro Ilir baru diganti pada tahun 977 Hijriah, maka seharusnya masa kekuasaannya sekitar 9 tahun, bukannya satu tahun. Perbedaan lama kekuasaan Kemas Depati yang disusun oleh Husni Rahim dan TR-1 adalah 7 tahun.

Masa kekuasaan antara 9-17 tahun tidak dapat dikatakan singkat, karenanya Ki Gede Ing Suro Ilir kemudian menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yaitu Pangeran Kemas Dipati (1589-1594), sehingga lama kekuasaannya hanya lima tahun. Angka tahun ini ternyata juga mengalami perbedaan dengan yang tercantum pada teks TR-1 karena menyebutkan angka tahun 977 Hijriah sebagai awal masa pemerintahannya dan baru diganti tahun 989 Hijriah atau berkuasa selama 12 tahun. Terlepas dari perbedaan masa kekuasaan tersebut, yang jelas pada tahun 1595 kekuasaan berpindah tangan kepada saudaranya yaitu Pangeran Madi Angsoka (anak Ki Gede Ing Suro Muda) yang memerintah sekitar tahun 1594-1627 atau sekitar 34-35 tahun. Meskipun pada masa Pangeran Madi Angsoka ini terjadi perang "kafir" dengan Bantam. Lamanya masa pemerintahan Madi Angsoka (34-35 tahun) menunjukkan kondisi perekonomian dan perpolitikan pada masa itu relatif stabil dan aman.

Ketika Pangeran Madi Angsoka wafat terjadi perebutan kekuasaan antara menantu (Pangeran Jambi) dengan dua paman istrinya (saudara Pangeran Madi Angsoka) dan kemenangan di pihak paman. Meskipun demikian yang menjadi raja adalah Pangeran Madi Alit (anak Ki Gede Ing Suro Muda) yang disebut Raja Depati (1629-1630). Pangeran Madi Alit hanya berkuasa selama satu tahun dan beliau mati terbunuh karena perkara wanita (De La Faille, 1971: 14). Pangeran Madi Alit kemudian digantikan oleh saudaranya Pangeran Seding

Puro atau juga disebut Pangeran Made Sokan yang dikenal dengan Raden Aria yang merupakan anak Kiai Mas Adipati dan memerintah sekitar tahun 1629-1636. Masa kekuasaan Raden Aria yang hanya tujuh tahun terhitung singkat, tapi mengingat sebutannya Pangeran Seding Puro (artinya meninggal di Pura atau Kraton), maka kematiannya kemungkinan disebabkan karena sakit yang telah lama diderita selama masa pemerintahannya. Oleh karena itu ada kemungkinan sebelum wafat Raden Aria masih sempat meninggalkan wasiat dan menunjuk seseorang untuk pengganti dirinya sebagai penguasa di kerajaan Palembang.

Raden Aria kemudian diganti oleh saudaranya Pangeran Seding Kenayan yang memerintah sekitar 1636-1652. Istri Pangeran Seding Kenayan adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang (*Ibid.*, hlm. 21). Pada masa pemerintahan Pangeran Seding Kenayan ini sempat terjadi ketegangan dengan pihak Belanda di Batavia berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang dilakukannya pada tanggal 20 Oktober 1642 yang menguntungkan pihak Belanda. Pangeran Sedo Ing Kenayan tidak memenuhi isi kontrak dan menaikkan harga lada pada tahun 1647, sehingga Belanda tidak memperoleh keuntungan dari monopolinya (Rahim, 1998: 73). Meskipun terjadi “ketegangan” dengan Belanda tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu tidak berpengaruh banyak dan relatif stabil, sehingga dapat memerintah selama kurun waktu 16 tahun. Pada masa pemerintahan inilah “lahir” *Undang-Undang Simbur Cahaya*, yang oleh masyarakat Palembang diyakini merupakan hasil karya Ratu Sinuhun (istri Pangeran Sido Ing Kenayan). Kestabilan masa pemerintahan Seding Kenayan juga didukung fakta bahwa dia diganti setelah meninggal.

Setelah Pangeran Seding Kenayan wafat ia digantikan oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran Seding Pesariyan (1652-1653) yang kemudian digantikan oleh anaknya Pangeran Seding Rajak (1653-1660). Jika melihat dari julukannya Pangeran Seding Pesariyan (artinya Pengeran yang meninggal di *Pesariyan* atau tempat tidur), maka masa kekuasaan yang singkat tersebut diduga disebabkan karena raja ini meninggal secara mendadak. Langkah Pangeran Sedo Ing Kenayan yang berani melawan Belanda ternyata juga diikuti oleh penerusnya yaitu Pangeran Seding Rajak yang pada tahun 1657 menangkap dua buah kapal Belanda di perairan Sungai Musi (*Ibid.*, hlm. 74). Karena sikap Palembang yang melawan itulah, akhirnya Belanda menyerang dan membakar kraton Kuto Gawang pada tahun 1659, sehingga Pangeran Seding Rajak mengundurkan diri ke Inderalaya dan meninggal dunia di sana. Pangeran Seding Rajak dimakamkan di dusun Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir. Kedudukannya digantikan oleh Raden Tumenggung atau Ki Mas Endi Ario Kesumo yang kemudian dikenal dengan Sultan Abdurrahman atau Sultan Abdul Hamal/Jamal dan lebih dikenal dengan Susuhunan Cinde Walang.

Di masa ini pula Palembang melepaskan diri dari Mataram dan menyatakan berdiri sendiri. Ki Mas Endi menggunakan gelar sultan yang lengkapnya menjadi Sultan Abdurrahman (*Khalifatul Mukminin Sayidul Imam*). Sebagai sultan pertama Palembang ia telah mendirikan kraton baru di Beringinjanggut dan kompleks pemakaman Cinde Walang. Pengangkatan ini disertai dengan penandatanganan kontrak perjanjian antara Palembang dan Belanda pada tahun 1662. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda diizinkan kembali untuk mendirikan loji dan gudang di tempat yang strategis dan dekat sungai. Loji tersebut dikenal dengan *Loji Sungai Aur* dan letaknya berhadapan dengan Istana Beringinjanggut (*Ibid.*).

Setelah Sultan Abdurrahman, yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam adalah Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago yang memerintah pada tahun 1706-1714. Pada tahun 1709 ia menobatkan putera sulungnya yaitu Raden Abubakar sebagai putera mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Purboyo. Meskipun demikian, putera mahkota ini tidak sempat menjadi raja karena wafat. Oleh karena itu kemudian adiknya, Raden Uju ditunjuk sebagai

penggantinya dan dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Raden Uju kemudian dinobatkan sebagai sultan ketiga di Palembang dengan gelar Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno yang memerintah antara tahun 1714 sampai tahun 1724 (10 tahun).

Tampaknya proses pergantian ini tidak bisa diterima oleh para elit kraton lainnya, yang ditandai dengan adanya perselisihan antara Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo tentang siapa yang lebih berhak menjadi sultan. Atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirimkan suatu ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Willem Daams. Ekspedisi ini berhasil mengusir pangeran Mangkubumi dan memperkuat kedudukan Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan.

Dua tahun setelah penandatanganan kontrak tersebut, Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Masa pemerintahannya berlangsung mulai tahun 1724 sampai tahun 1758. Pada tanggal 10 September 1755 terjadi pembaharuan kontrak untuk kontrak terdahulu (2 Juni 1722), yang ditandatangani oleh Paravicini dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo. Dengan terjadinya perjanjian tersebut berimbas pada kestabilan politik pada masa pemerintahannya sehingga dapat mencapai 34 tahun. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kraton Kuto Batu (Kraton Kuto Lamo).

Pada tahun 1758, kekuasaan berpindah kepada anak sulungnya yaitu Pangeran Adi Kesumo, setelah menjadi sultan bergelar Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang berkuasa dari tahun 1758–1776. Seperti pendahulunya, pada masa inipun terjadi pembaruan kontrak dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1763. Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo kemudian digantikan oleh putra sulungnya dengan gelar Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Pada masa pemerintahannya, putra sulungnya, Raden Hasan dinobatkan sebagai putra mahkota, pewaris tahta kesultanan, bergelar Raden Hasan Pangeran Ratu. Sultan Muhammad Bahauddin membangun Kuto Besar yang dilengkapi dengan taman dan rumah dan kemudian menempatnya pada hari Senin tanggal 23 bulan Sya'ban tahun 1211 Hijriah (21 Februari 1797 Masehi). Pangeran Ratu kemudian menempati Kuto Lamo yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.

Menurut buku yang disusun oleh Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya Palembang pada tahun 1984, yang berjudul "Sultan Mahmud Badaruddin II" disebutkan bahwa menurut ketentuan yang berlaku maka putra sulung dari seorang raja adalah putra mahkota dan merupakan pewaris tahta yang sah. Meskipun demikian, penetapannya sebagai sultan tetap harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah yang terdiri dari para pembesar istana dan para alim ulama. Berdasarkan musyawarah tersebut pada April tahun 1804 Raden Hasan Pangeran Ratu dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II; sementara Sultan Muhammad Bahauddin bergelar Susuhunan Muhammad Bahauddin. Dari naskah kuna diketahui bahwa Sultan berkedudukan di Kraton Lama atau Kraton Kuto Batu, sementara Susuhunan berkedudukan di Benteng Kuta Anyar atau Benteng Kuto Besar.

Pada saat yang bersamaan adik Raden Hasan Pangeran Ratu, yakni Raden Husin Pangeran Adi Menggalo diangkat menjadi Pangeran Adipati Negara sebagai pelaksana harian pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II terjadi pembumihangusan loji Belanda di Sungai Aur pada tanggal 14 September 1811, yang dikenal dengan *Peristiwa Sungai Aur*. Peristiwa ini menandai kemerdekaan Palembang yang telah lama di bawah kekuasaan Belanda. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tanggal 20 Maret 1812 Gubernur Jenderal Raffles mengirim ekspedisi militer ke Palembang, kemudian menyerang Palembang dan berhasil mendudukinya, sehingga Sultan Mahmud Badaruddin II

mengundurkan diri ke Muara Rawas setelah menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada adiknya Pangeran Adipati Menggalo Husin Diauddin dan memerintahkan untuk tetap berada di Palembang (Anonim, 1984: 29-30). Raden Muhammad Husin Diauddin diangkat menjadi sultan oleh Inggris dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (1912-1813) (Rahim, 1998: 80). Pengangkatan itu dimaksudkan untuk mengadu domba antara kakak dan adik.

Belanda mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan pada tanggal 13 Juli 1813 sampai 14 Agustus 1813 (sekitar satu bulan). Pada tanggal 14 Agustus 1813 sampai 23 Juni 1818 Inggris menurunkan Sultan Mahmud Badaruddin II dan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai penguasa Palembang. Di sisi lain pernah juga terjadi kedua kakak beradik ini memerintah bersama-sama, yaitu antara 23 Juni 1818 sampai 30 Oktober 1818. Sultan Ahmad Najamuddin II berkuasa di Kraton Kuto Lamo sebagai Sultan Mudo; sementara Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Benteng Kuto Besar sebagai Sultan Tuo.

Pada masa kekuasaannya kali ini, yaitu pada tahun 1819 Sultan Mahmud Badaruddin II menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu (Sultan Ahmad Najamuddin III). Pada saat yang bersamaan Sultan Mahmud Badaruddin II bergelar Susuhunan Mahmud Badaruddin. Pada tanggal 1 Juli 1821 keraton diduduki oleh Belanda dan tanggal 3 Juli 1821 Susuhunan Mahmud Badaruddin dan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu ditangkap dan dibuang ke Ternate. Tanggal 26 November 1852 Susuhunan Mahmud Badaruddin wafat, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu wafat tahun 1860.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Palembang, Belanda memanggil kembali Sultan Ahmad Najamuddin II dan anaknya dari pengasingannya di Cianjur. Pada tanggal 16 Juli 1821-19 September 1825, Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, anak Sultan Ahmad Najamuddin II diangkat menjadi sultan Palembang oleh Belanda, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II bergelar Susuhunan Husin Diauddin. Pada tanggal 22 November 1824, Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dengan sepengetahuan ayahnya memberontak terhadap Belanda, yang menyebabkan ditangkapnya Susuhunan Husin Diauddin dan dibuang ke Batavia dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1825. Sementara Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom baru berhasil ditangkap oleh Belanda pada tanggal 15 Oktober 1825 dan tanggal 19 Oktober 1825 dibuang ke Banda dan lalu ke Manado dan wafat di sana pada tahun 1844 (*Ibid.* Hlm. 287-289). Kesultanan Palembang berakhir ditandai dengan dihapuskannya kesultanan dan diserahkan pemerintahan atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda.

Menurut Rahim (1998: 81-82), penghapusan Kesultanan Palembang terjadi sekitar tanggal 18 Agustus 1823, yaitu tanggal penandatanganan maklumat perjanjian penyerahan kekuasaan sekaligus penghapusan Kesultanan Palembang (*Ibid.*) Di Nusantara umumnya entitas atau masyarakat politik (*political entity*) disebut kerajaan. Milner (1982) menyebutnya sebagai "kondisi memiliki seorang raja". Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa pra-Islam, di mana raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai *bodhisattva* alias pribadi yang tercerahkan.

Kedatangan Islam tampaknya tidak mengubah esensi entitas politik tersebut, khususnya mengenai raja dan kerajaan, karena konsepsi konsepsi di sekitar soal ini tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan telah mendapatkan legitimasi dari para ulama sendiri. Penyerahan kekuasaan tersebut dapat dibaca dalam maklumat penyerahan kekuasaan Sultan Palembang kepada Belanda sebagai berikut :

Bahwa inilah surat berita undang-undang. Bahwa Sri Paduka Ratu Ahmad Najamuddin, Sultan dari negeri Palembang kasih selamat kepada siapa yang melihat atau mendengar bacanya. Bahwa seperti perjanjian yang terbuat dari segala keridaan dari kedua pihak,

yaitu antara Gubernemen Nederland dan antara kita Sri Paduka Tuan Sultan supaya membaiki nasibnya rakyat-rakyat kita, maka demikian yang dari waktu ini segala titah dan pemerintahan atas negeri Palembang dan atas rakyat-rakyat sekaliannya dipeganglah oleh gantinya Gubernemen adanya. Adapun kita Sri paduka Tuan Sultan akan duduk di dalam bicara yang menimbang hukuman kesalahan dan ... (tidak terbaca) dunianya. Dan dari hal agama itulah akan diputuskan oleh pangeran penghulu menurut hukum di dalam Alquran; dan apabila tiada menerima putusan penghulu itu, bolehlah ... (tidak terbaca) bicara pada kita. Bahwa segala pemerintahan dari juga-juga dan dari... (tidak terbaca) atau hasil-hasil itulah dipegang oleh gantinya gubernemen adanya. Bahwa kita Sri Paduka Tuan Sultan akan memakai kemuliaan dan hormat kita... (tidak terbaca) senantiasa ada mengerjakan itu dengan segala rajin, istimewa supaya menolong pada menjalankan segala aturan dari pemerintahan gubernemen adanya. Bahwa kita berjanji dengan sesungguhnya akan menolong pada menjalankan ketentuan itu demikian adalah menitahkan yang segala priayi dan mantra-mantra dan rakyat dari negeri, menjunjung titah dan perintah yang akan diberi oleh gantinya, gubernemen adanya; Bahwa Gubernemen Nederland telah tetapkan dari pada kita punya kehidupan dan bagi kehidupan priayi-priayi dan mantra-mantra maka demikian kami tidak dapat lagi pungut hasil dan tidak lagi ... (tidak terbaca) seperti dahulu adanya; Bahwa haruslah yang segala orang yang memegang piagam penyerahan dia kepada gantinya gubernemen yang itu segala piagam yang terberi oleh kita atau oleh raja-raja Palembang zaman dahulu adanya. Maka hendaklah diserahkan piagam itu dengan selekas dan yang segala kepala pasirah dan kepala-kepala dusun dan yang lain-lainnya dengan segeranya sampai kehadiran gantinya Gubernemen. Supaya mendengarkan titahnya dari hal piagam-piagam dan dari yang menjadi... (tidak terbaca) pada kemudian adanya. Supaya mengetahuilah di dalam seluruh negeri, maka dibaca dan dilekatkan ini surat berita dan disalin dia supaya tertunjuk di tanah uluan dan uluan adanya. Dan terberi oleh kita Sri Paduka Tuan dari Negeri Palembang kepada hari Isnen sebelas hari bulan Zulhijah tahun seribu dua ratus tiga puluh delapan adanya". (Rahim, 1998: 81-82).

Dari paparan tersebut dan data sejarah mengenai para raja dan sultan yang pernah memerintah di Palembang Darussalam dapat diketahui bahwa tidak ada aturan atau hukum yang baku tentang proses pergantian atau pewarisan tahta pada masa Kerajaan Palembang. Dengan kondisi seperti ini rawan terjadinya konflik karena masing-masing tokoh merasa berhak atas tahta kerajaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terlihat adanya ketidakteraturan garis keturunan dalam hal pewarisan kekuasaan, sehingga muncul saudara-saudara muda atau bahkan adik dari pihak permaisuri bisa menduduki tahta kerajaan atau kesultanan. Hal ini terlihat dari proses suksesi dari masa pemerintahan Ki Gede Ing Sura Tua sampai Pangeran Sedo Ing Kenayan, yaitu sejak tahun 1552 - 1652. Selama kurun waktu 100 tahun telah terjadi pergantian kekuasaan di Palembang sebanyak 10 kali. Dari sepuluh raja tersebut, hanya empat orang raja yang berkuasa lebih dari sepuluh tahun, yaitu Ki Gede Ing Sura Tua 26 tahun; Ki Gede Ing Sura Muda 17 tahun; Pangeran Madi Ing Angsoka 34 tahun dan Pangeran Sedo Ing Kenayan 11 tahun, selebihnya berkuasa kurang dari sepuluh tahun.

Bahkan ada dua orang raja yang berkuasa hanya sekitar satu tahun, yaitu Pangeran Madi Alit dan Pangeran Sedo Ing Kenayan. Selain raja-raja tersebut, Kiai Mas Adipati hanya berkuasa selama 5 tahun; Pangeran Sido Ing Puro 9 tahun; dan Pangeran Sedo Ing Rajek 7 tahun. Konflik intern para elit kesultanan Palembang ini juga dipicu oleh persaingan antara saudara seayah lain ibu untuk memperebutkan kekuasaan. Istri para raja yang lebih dari satu

merupakan salah satu pemicu timbulnya konflik intern di kalangan keluarga raja Palembang (Purwanti, 2004: 34).

Keadaan ini baru dapat teratasi sejak Kiai Mas Hindi atau Pangeran Ario Kesumo Abdurrohim memproklamirkan pembentukan Kesultanan Palembang dan terlepas dari Mataram. Hal ini tampak dari penunjukkan putra mahkota, yang tidak lain adalah anak pertama sultan dengan permaisuri. Putra mahkota ini diberi gelar Pangeran Ratu. Meskipun aturan tertulis mengenai hak pewarisan tahta sebelum Sultan Mahmud Badaruddin II belum diketahui sumber tekstualnya, namun dari naskah-naskah lama Palembang dapat diketahui bahwa sebelum sultan yang berkuasa meninggal atau turun tahta, dia telah mengangkat seorang putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Penobatan sebagai putera mahkota tersebut, bahkan sering juga dilanjutkan dengan penobatan yang bersangkutan sebagai sultan baru lengkap dengan gelarnya.

Sementara itu, sultan yang lama masih tetap memerintah, tetapi kemudian mengambil gelar "Susuhunan". Walaupun sultan baru sudah diangkat, tidak berarti "sultan lama" yang bergelar susuhunan langsung "lengser keprabon" atau turun dari tahta, sehingga tidak memegang kendali pemerintahan lagi. Berdasarkan sumber tekstual, ternyata yang terjadi justru sebaliknya, Susuhunan tetap berkuasa penuh berdampingan dengan sultan yang baru saja dinobatkan.

Hal ini juga diperkuat dengan stempel kesultanan Palembang peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin II yang berangka tahun 1819 Masehi (1234 H). Pada saat mengeluarkan stempel, Sultan Mahmud Badaruddin II sudah meletakkan tahtanya dan menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Setelah menobatkan anaknya, Sultan Mahmud Badaruddin II kemudian mengambil gelar *Susuhunan*, seperti yang tertera pada stempel (Purwanti, 2002: 119).

Di sini justru tampak adanya proses "pembelajaran" bagi sultan baru dalam soal kepemimpinan ataupun pemerintahan, sebelum *susuhunan* melepaskan diri secara penuh sebagai penguasa kesultanan (kaderisasi). Kemudian, dari sumber tekstual juga diperoleh informasi, bahwa sejak digunakannya Benteng Kuto Besak, maka Putera Mahkota menempati Benteng Kuto Lama, sementara sultan lama atau *susuhunan* tinggal di Benteng Kuto Besak. Ternyata, perbedaan lokasi bermukim dan masih tetap berkuasanya *susuhunan*, pada masa kemudian justru dimanfaatkan oleh pihak Belanda dan Inggris untuk lebih memperkeruh proses pengambilalihan kekuasaan (suksesi) di lingkungan kraton Kesultanan Palembang dengan cara mengadu domba di antara keduanya. Usaha ini berhasil baik sehingga dalam masa sebelas tahun, Inggris dan Belanda berhasil mengangkat dan menurunkan kedua adik kakak tersebut sebanyak 6 kali sampai dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang.

Proses pergantian raja di Palembang baru ditemukan rujukannya pada salah satu naskah kuna "Hikayat Palembang" (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda, menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut:

Adapun cerita dari segala raja-raja yang memerintah di atas tahta kerajaan negeri Palembang itu, terlalu banyak fasal ia berganti-ganti menjadi raja di atas tahta kerajaan memerintah di dalam negeri Palembang. Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja dan adakalanya dengan sebab perang dan adakalanya daripada sebab wasiat, yakni pesan. Tatkala masanya raja lagi hidup, berwasiat kepada sekalian punggawa menteri dan orang besar-besar sekalian dengan sumpah: "Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku sukai anakku mengganti akan menjadi raja". Demikianlah yang dikerjakan oleh segala punggawa menteri dan sekalian orang di dalam negeri Palembang sepertimana yang wasiat itu juga. Dan adakalanya dengan sebab berperang

dengan orang putih, yaitu Belanda. Dan apabila kalah daripada perang itu, Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir di Palembang, menyuruh saudaranya menjadi ganti jadi raja di atas tahta di dalam negeri Palembang menahan bicara orang Putih". (Woelders, 1921: 74).

Berdasarkan naskah yang ditulis antara tahun 1863 - 1880 (*Ibid.*, hlm. 49) tersebut dapat diketahui bahwa proses pergantian raja di kerajaan Palembang Darussalam bisa bermacam-macam, namun satu hal yang harus dicatat adalah kalimat "*Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja...*". Kalimat ini menegaskan adanya semacam aturan baku tentang proses pergantian raja yang dianggap sah dan mempunyai legitimasi yang kuat, yaitu bahwa penggantinya adalah anak raja yang memerintah sebelumnya. Meskipun dalam kalimat tersebut tidak menyebutkan anak raja yang mana yang berhak menggantikan raja sebelumnya. Namun dari naskah itu juga dapat diketahui bahwa sebelum raja yang berkuasa turun tahta atau meninggal dunia, terlebih dahulu mengangkat putra mahkota dan diberi gelar Pangeran Ratu. Gelar putra mahkota ini pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Husin Diauddin bergelar Prabu Anom, karena gelar Pangeran Ratu sudah digunakan oleh putra mahkota yang diangkat oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Di sisi lain, dari penggalan kalimat dalam naskah tersebut dapat dipastikan bahwa raja yang berkuasa sebelumnya punya otoritas yang tinggi untuk menetapkan penggantinya, meskipun lewat pesan atau surat yang berbentuk wasiat.

Hasil musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003 di Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang, yang menginginkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penetapan syarat Kesultanan Palembang Darussalam untuk kepentingan sejarah, maka musyawarah adat kemudian menyusun suatu rancangan yang berisi pedoman atau syarat-syarat menjadi sultan. Adapun isi pedoman atau persyaratan-persyaratan sebagai sultan Palembang adalah sebagai berikut (Siregar, 2004: 73-74):

- 1) Beragama Islam, termasuk keluarganya.
- 2) Dari zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (diutamakan dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II).
- 3) Mempunyai bukti Amanah (berupa benda-benda peninggalan dari sultan-sultan Palembang Darussalam).
- 4) Dikenal oleh masyarakat Palembang dan kesultanan lainnya.
- 5) Dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang Darussalam.
- 6) Peduli terhadap peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.
- 7) Tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pengrusakan atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.
- 8) Berani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat.
- 9) Bertempat tinggal di Palembang, mengenal negeri Palembang.
- 10) Berpendidikan yang tinggi minimal SMA.
- 11) Berpengalaman dalam berorganisasi.

Djohan Hanafiah, salah satu tokoh Sejarah dan Budayawan Palembang, justru memberikan persyaratan yang berbeda. Ia mengemukakan bahwa kriteria menjadi sultan adalah genealogi, geografis, simbol-simbol kerajaan dan pengakuan dari masyarakat (Siregar, 2004: 69). Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Mustofa Al-Azhari, seorang ulama Palembang, Rahmawati Siregar menyebutkan bahwa untuk menentukan seseorang berhak menjadi sultan, tidak hanya dilihat dari faktor genealogi, wilayah, kekuasaan dan pengakuan masyarakat saja, melainkan juga harus dilihat dari segi kepemilikan pesan-pesan khusus dari

para leluhur. Artinya, yang menjadi sultan adalah orang pilihan dari leluhu, dan juga didukung oleh legitimasi informal diperoleh seseorang karena kapasitasnya dalam sesuatu bidang dianggap mumpuni oleh masyarakat, misalnya “kiai” untuk ulama. Legitimasi informal ini bisa dilihat dari penerimaan masyarakat sekitar kepada yang bersangkutan secara luas dan tanpa pamrih.

Berdasarkan paparan mengenai konsep negara dan kedudukan raja di atas kaitannya dengan proses pergantian kekuasaan, maka dapat dijelaskan bahwa secara garis besar, ada tiga unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang sultan agar kekuasaannya mempunyai legitimasi dan kredibilitas, yaitu genealogis, geografis dan simbol-simbol atau tanda-tanda kebesaran kerajaan (Regalia) yang biasanya merupakan warisan dari para pendahulunya. Tanpa ketiga unsur tersebut, legitimasi kedudukan seorang raja menjadi lemah dan rawan pemberontakan. Memang dalam salah satu persyaratan pengangkatan seseorang menjadi sultan adalah kepemilikan benda-benda pusaka, umpamannya:

- Tongkat Sultan Mahmud Badaruddin II yang dipakai jika sultan berperang.
- Stempel kesultanan Palembang Darussalam.
- Istambul (kalung yang berisikan Alquran kecil) dari tembaga.
- Baju berupa jubah Sultan Mahmud Badaruddin II.
- Naskah kuna yang ditulis Sultan Mahmud Badaruddin II.
- Naskah kuna zuriat kesultanan.

Menurut tradisi, yang disebut benda pusaka kesultanan (regalia) adalah benda-benda yang dimiliki oleh suatu kerajaan sejak awal berdirinya (raja/sultan pertama), dan benda tersebut diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, benda-benda pusaka tersebut menjadi simbol legitimasi raja yang dinobatkan dan lambang kedaulatan kerajaannya. Bahkan, benda-benda regalia ini menjadi bagian terpenting dari ritual pengangkatan seorang raja. Benda pusaka (regalia) ini umum ditemukan pada kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara (Geldern, 1982).

B. Analisis Sosiologis terhadap Pergantian Sultan

Setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya, wilayah Palembang mengalami kekosongan pemerintahan selama kurang lebih seratus tahun. Pemerintahan baru muncul pada abad ke-16. Ki Gede Ing Suro dianggap sebagai pendiri Kerajaan Palembang yang berkuasa pada abad ke-16. Menurut Wolders (1975), Ki Gede Ing Suro menduduki jabatan sebagai Raja di Palembang yang kemudian disusul dengan Gending Ilir. Ki Gede Ing Suro memerintah di Kerajaan Palembang selama 2 tahun. Raja Ki Gede Ing Suro kemudian digantikan oleh saudaranya, Gending Ilir, yang berkuasa selama 1 Tahun.

Gelar sultan yang digunakan oleh penguasa menandakan bahwa rajanya beragama Islam. Pada awal abad ke-16, ketika bangsa Eropa hadir di wilayah Palembang, mereka berusaha keras untuk mendapatkan komoditi perdagangan secara langsung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Disinilah Pengaruh bangsa Eropa terhadap eksistensi seorang Raja, Ki Gede, atau Sultan yang tidak saja pengakuan dari kulturnya saja tetapi juga dari kultur keyakinannya. Bangsa Eropa telah berhasil menjadikan Raja yang beragama Islam menambah gelar Sultan. Ini dilakukan untuk penguatan kekuasaan dan hukum terhadap penguasa pribumi. Mereka dianugrahi bermacam-macam tanda kebesaran sebagai suatu simbol kekuasaan. Akibatnya, di dalam kesultanan Palembang sendiri timbul persaingan antar anggota keluarga raja dan sultan yang ingin berkuasa.

Dari sini dapat dilihat bahwa pergantian kekuasaan pada saat Kerajaan Palembang berjalan seperti umumnya terjadi di beberapa Kerajaan di Jawa yang beraliran Hindu-Buddha yakni geneologi dan martabat. Hal ini juga berlaku dalam membaca proses suksesi kepemimpinan di masa lalu, saat kesatuan politik masih berbentuk kerajaan atau kesultanan, yang di beberapa daerah di nusantara masih terus berlanjut sampai saat ini. Apalagi jika dilihat bahwa pengangkatan seorang raja (sultan) tidak terlepas dari konsep negara (kekuasaan), yang tentu saja berbeda dengan konsep negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.

Raja atau Sultan merupakan tipe kepemimpinan yang menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap eksistensinya, apakah berupa penolakan, adaptasi, dan atau asimilasi. Tidak jarang hal ini menghadirkan konflik politik yang disebabkan oleh faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu. Tidak kalah pentingnya, analisis struktural yang membahas status dan peranan berbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, semuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.

Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*).

Di sini, tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan. Misalnya peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.

Dalam kerangka teoritik sosiologi, tipe kepemimpinan menurut teori Weberian ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe informal adalah pemimpin informal, dan ada kekuasaan karismatik. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja.

Meminjam teori Bendix (1960), *power* dan *authority*, masyarakat feodal di Eropa, kemudian Weber pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga menjelaskan hubungan *patront-client* melalui teorinya yaitu: (1) teori yang tradisional, (2) karismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional, seorang *patront* memperoleh kedudukannya melalui secara turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurun ini dibahas oleh Bendix tetapi kurang membahas tentang *patront-client* pada kepemimpinan rasional. Bendix sedikit menyinggung karismatik seorang penguasa. Pada hubungan karismatik, seorang *patront* mempunyai *client* yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena kharismanya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan kiai.

Sistem pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam merupakan suatu pertemuan berbagai nilai, kepentingan dan kultur, dimana konsep kepemimpinan didasarkan pada otoritas tradisional yang didasarkan pada pengakuan kultural. Tipe ini memudahkan dalam mempengaruhi masyarakat, karenanya kepemimpinan tradisional tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan berbasis *genealogic-hereditically* (keturunan) dan karismatik.

Namun, diantara dua tipologi basis kepemimpinan ini, kepemimpinan berbasis karismatik merupakan peletak dasar setiap kepemimpinan tradisional diberbagai entitas sosial. Konsep

Weber tentang karismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia. Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisma (Weber, 2009).

Di Indonesia pada abad ke-19, tokoh-tokoh Islam yaitu para kiai menduduki kepemimpinan yang karismatik. Terlepas dari latar belakang apapun yang mendasari penetapan syarat sebagai sultan adalah keturunan (*zuriat*) Kesultanan Palembang, secara tradisi ini dapat dibenarkan. Bagaimanapun, faktor keturunan atau genealogis menjadi salah satu penentu legalitas dan kedaulatan suatu kesatuan politik di masa lalu. Raja dipandang sebagai pusat Kosmos dan dari raja terpancar kekuatan yang berpengaruh pada alam maupun masyarakat. Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkokoh keabsahan (*legitimacy*) sebagai raja. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja (*pulung ratu*) dan konsep tentang garis keturunan darah raja (*trahing kusuma rembesing madu*). Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan, bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah raja yang dapat menjadi raja.

Konsep seperti ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru, karena dalam konsep kekuasaan raja di Jawa, misalnya (dan Asia Tenggara umumnya), kedudukan raja paling sering diabsahkan (juga) dengan membuktikan kesinambungan. Hubungan darah atau pengalaman yang serupa dengan seorang tokoh pendahulu yang agung memungkinkan seseorang ikut tersinari oleh *aura* (sinar) keagungan. Bukan itu saja, justru hal terpenting dari penelusuran genealogi ini adalah bisa menjadikannya mata rantai kesinambungan. Dalam konsep Jawa *trahing kusuma, rembesing madu, wijining tapa, tedaking andana warih* (turunan bunga, tirsan madu, benih pertapa, turunan mulia) adalah ciri-ciri turunan leluhur yang agung dan tak bernoda.

Karena itu, menelusuri silsilah seseorang, bila mungkin menelusuri asal usul seseorang raja yang berkuasa atau raja bawahan yang besar, merupakan sesuatu yang diusahakan dengan banyak makan waktu dan kesungguhan yang tiada hentinya. Datangnya agama Islam tidak menghilangkan kebiasaan membuktikan kesinambungan melalui kekerabatan (Berg, 1989: 96 vide Leirissa, 1996: 62) dan ini diperkuat oleh kebiasaan Arab, yang biasanya diikuti oleh orang berpangkat di Jawa, untuk menggabungkan nama salah satu leluhur dengan namanya sendiri. Tuntutan akan kesinambungan juga dinyatakan dalam ketentuan Islam mengenai *isnad*¹.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses pengangkatan raja-raja atau sultan-sultan yang pernah memerintah di Palembang tidaklah berbeda dengan yang ada di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara ini. Meskipun kesatuan politik

¹ Pada masa kesultanan Palembang Darussalam, penguasa terakhir adalah Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, anak Sultan Ahmad Najamuddin II atau Susuhunan Husin Diauddin. Jadi, menurut tradisi dan adat yang berlaku di Kesultanan Palembang dahulu, sebenarnya yang berhak menjadi sultan berikutnya di Palembang adalah anak keturunan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom ini, yang merupakan keponakan Sultan Mahmud Badaruddin II. Sejak kalah perang dengan Inggris dan ditangkap oleh Belanda, Sultan Mahmud Badaruddin II tidak pernah berhasil merebut kekuasaannya kembali sampai meninggal di tempat pengasingannya di Ternate. Tentu saja, seseorang yang kalah perang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam pembuatan suatu perjanjian. Meskipun saat di pengasingan mendapat perlakuan seperti layaknya sultan, namun itu bukan sesuatu hal yang istimewa, karena Sunan Banguntapa (Sunan Pakubuwono VI) dari Kasunanan Surakarta juga mendapat perlakuan yang sama. Bahkan dalam pengasingannya di Ambon Paku Buwana VI dibuatkan istana dengan segala kelengkapannya oleh Belanda (Day, 1989: 32-88).

ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, yaitu Konsep Hindu-Buddha, sementara Islam terkadang muncul dalam aspek sosiologis dan politik. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya. Selain kedua aspek di atas, yaitu legalitas dan simbolisasi, yang paling penting adalah struktur organisasi yang “dipimpin” oleh seorang Sultan. Hal ini mengingat gelar “sultan” bisa mengacu kepada seseorang yang menyatukan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dan berbagai lambing yang bersifat magis dan mistis, yang meyatukan kualitas perlengkapan-perengkapan kekuasaan itu (Kartodirdjo, 1969: 13).

Jadi munculnya dua sultan di kesultanan Palembang merupakan fenomena yang tidak biasa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai status, *powershift* dan legitimasi. Meskipun baik Sultan Prabu Diraja, maupun sultan Iskandar Badaruddin dijadikan sebagai sultan hanya sebatas simbolisasi kebudayaan dan kedigdayaan kesultanan Palembang Darussalam. Namun tetap saja posisi sultan pada level simbol kebudayaan memiliki pengaruh yang kuat khususnya bagi masyarakat asli Palembang. Sebagai simbol kebudayaan, maka seorang sultan mampu memainkan beberapa peranan strategis yakni sebagai actor dari sistem kebudayaan, sistem sosial dan sistem personal. Seorang sultan memiliki kemampuan *leadership* sebab sultan berperan sebagai pusat sosialisasi dan sekaligus evaluasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya.

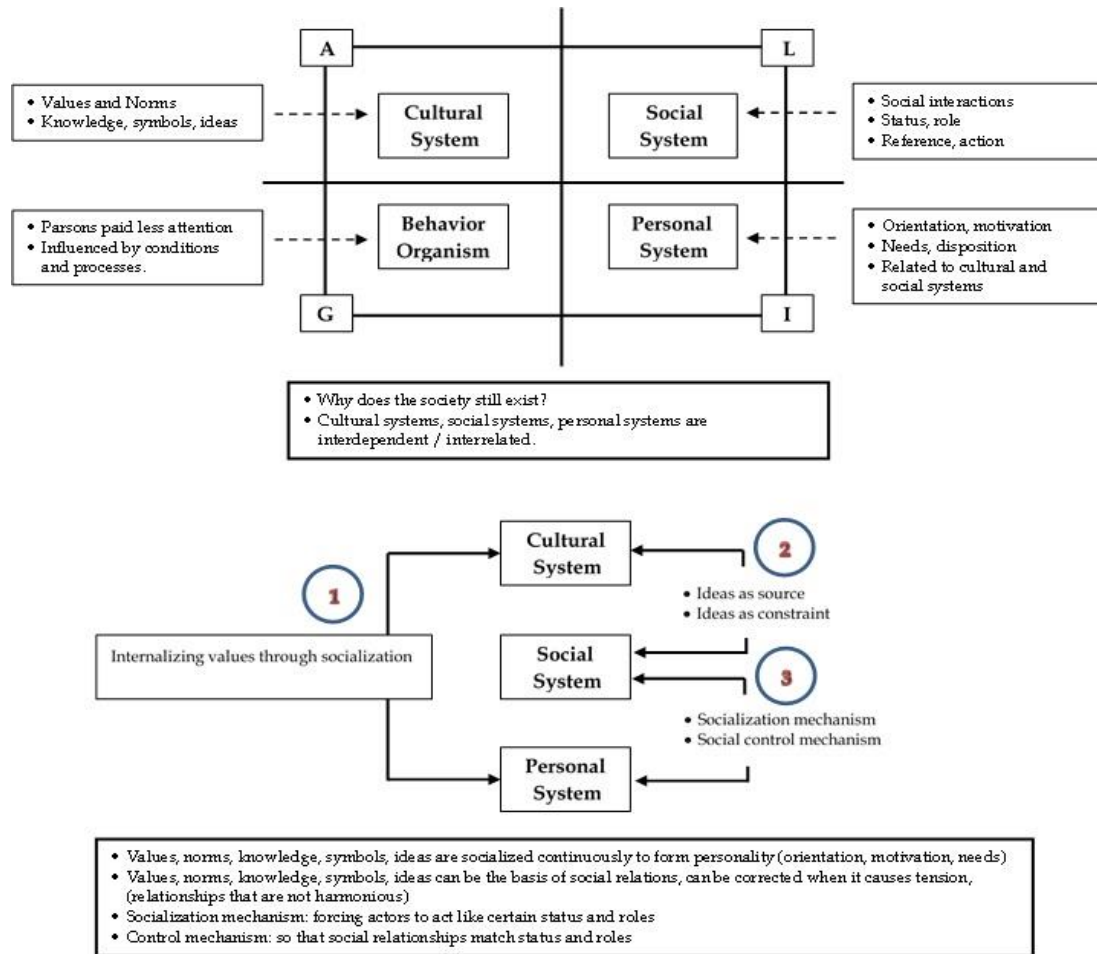
Masyarakat menurut Parsons merupakan jalinan dari sistem didalamnya berbagai fungsi berkerja seperti norma-norma, nilai-nilai, konsensus dan bentuk-bentuk kohensi sosial lainnya. Berjalannya fungsi yang berbeda-beda disebut spesialisasi, dimana setiap fungsi bersifat saling menopang atau sinergis. Satu organ dapat dikomandoi organ lainnya, tetapi pihak yang memberi perintah tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya, terjadi hubungan timbal-balik antara pemberi perintah dengan yang diperintah. Kesemuanya itu membangun suatu bentuk koordinasi antar sistem sosial. Inilah yang disebut dengan para pendukung sultan baik Sultan Iskandar maupun Sultan Prabu Diraja terlepas keduanya mempunyai hubungan geneologi dengan sultan Badaruddin II.

Karenanya, eksistensi masyarakat yang didalamnya terdiri dari sistem sosial, sistem budaya dan sistem materi, selalu membutuhkan suatu kondisi-kondisi yang menciptakan keberadaan (*condition of existence*). Menurut Parsons, kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial itu, agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, ada empat fungsi penting yaitu AGIL (A) Adaptation, (G) Goal Attainment, (I) Integration, dan (L) Latensi. *Adaptation* (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yg gawat, sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur antar hubungan fungsi lain (A,G,L). *Latency* (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi².

² Berdasar konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan bahwa sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (*adaptation*). Berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (*goal attainment*). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (*integration*). Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya sekedar berkait dengan hal peran. Relasi fungsi tidak selalu terpadu (integratif) karena dapat saja relasi yang saling konflik, lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi.

Ini bisa dibaca melalui teori Talcott Parson melalui AGIL.

Gambar 1
Teori AGIL
Pertemuan AGIL dan Sistem



Source: (Parsons, 1951 in Soekanto 1986)

5. Kesimpulan

Palembang, pada masa kesultanan Palembang Darussalam berfungsi sebagai pusat kerajaan, dalam kehidupan masyarakatnya upacara-upacara yang bersifat keagamaan dan yang bersifat umum serta berhubungan dengan kerajaan, telah menjadi adat kebiasaan. Dalam babad-babad, hikayat-hikayat, dan berita-berita asing disebutkan bahwa upacara dan pesta-pesta dihubungkan dengan kerajaan, seperti penobatan raja atau putra mahkota, khitanan, pernikahan putra-putri raja, kelahiran putra-putri raja, dan lain-lain, yang berkenaan dengan kehidupan raja dengan keluarga; upacara dan pesta dengan penerimaan utusan-utusan

Dalam fungsi terdapat struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur dan fungsi yang saling terkait erat (kalau tanpa kaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas menyangkut hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja. Lihat Poloma (2005). *Contemporary sociological theory*, diterjemahkan oleh tim Yasogama. Lihat juga Hamilton (1990). *Reading From Talcott Parsons*, diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo. Lihat juga Ritzer & Goodman (2005). *Teori Sosiologi Modern*, diterjemahkan oleh Alimandan.

kerajaan asing, upacara Maulud Nabi, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Upacara-upacara dan pesta-pesta tersebut biasanya dimeriahkan oleh bermacam-macam keramaian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Salah satu tugas sultan menjadi seorang *umaro*, artinya beliau menjadi penasehat agama pada pemerintahan. Keberadaan Kesultanan Palembang bukan hanya bidang budaya saja melainkan juga ada unsur politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bahwa proses pengangkatan raja-raja atau sultan-sultan yang pernah memerintah di Palembang tidaklah berbeda dengan yang ada di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara. Meskipun kesatuan politik ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, yaitu Konsep Hindu-Budha, sementara Islam hanya sebagai baju luarnya saja. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya.

Sebagai kesultanan yang bersifat maritim dan absolut, tampaknya rujukan yang bisa diarahkan satu-satunya monarki absolut yang masih ada di Asia Tenggara adalah Kesultanan Brunei Darussalam. Namun, asal kesultanan ini bukan dari kerajaan agraris seperti yang melahirkan peradaban keraton, tetapi dari suatu kesultanan di muara sungai dan laut seperti, kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain (Onghokham, 2003: 59).

Berlainan dengan di kesultanan laut, di kerajaan agraris kesatuan politik (sacral) masih tetap ada selagi pusaka-pusaka masih ada, dan sitihinggil (tahta) masih berada di tempat suci. Singkat kata, selama ada keraton maka kerajaan masih ada dan raja masih diakui oleh masyarakatnya. Bahkan kerajaan yang fungsi politiknya telah dihapuskan ratusan tahun lalu, seperti keraton-keraton di Cirebon, fungsi budaya dan sakralnya tetap bertahan. Hal ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan maritim, karena meskipun raja (sultan) dan keratonnya masih ada, namun keberadaannya tidak diakui lagi oleh masyarakatnya. Beberapa contoh bisa dikemukakan di sini ialah Kesultanan Deli di Sumatera Utara, yang sultannya juga seorang perwira; kesultanan Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.

6. Ucapan Terima Kasih

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, atas dukungan dana dan fasilitas untuk membuat penelitian ini berhasil melalui Skema Hibah Penelitian Dasar Interdisipliner (ID Registrasi 191160000020844, Surat Keputusan Nomor 852 Tahun 2019).

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2002). *Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah: Sebuah Sketsa*. Jakarta: Prisma.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The Concept of Education in Islam: A Framework for An Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Ambary, H. M. (1998). *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Anonymous. (1984). *Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Bendix, R. (1960). *Max Webber, An Intellectual Portrait*. New York: Doubleday.

- Budi, B. S. (2005). A Study on the History and Development of the Javanese Mosque: Part 2: The Historical Setting and Role of the Javanese Mosque under the Sultanates. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 4(1), 1-8.
- Day, A. (1989). Drama pengasingan Bangun Tapa di Ambon, Puisi Kedudukan Raja di Surakarta. In Gesick, L. (1989). *Pusat, Simbol dan Hirarki Kekuasaan: Esai-esai Tentang Negara-negara Klasik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- De Graaf, H. J., & Pigeaud, T. H. (2001). *Kerajaan Islam Pertama di Jawa*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De la Faille, P. D. R. (1971). *Dari zaman kesultanan Palembang (Vol. 8)*. Jakarta: Bhratara.
- Fadil, S. (1991). *Pengislaman Dunia Melayu: Transformasi Kemanusiaan dan Revolusi Kebudayaan*. Dalam *Dewan Budaya*, 12.
- Hamilton, P. (1990). *Reading From Talcott Parsons*. Translation by Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hanafiah, D. (1988). *Kuto gawang: Pergolakan dan permainan politik dalam kelahiran kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Parawisata Jasa Utama.
- Hasmy, A. (1993). *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Alam'arif.
- Heine-Geldern, R., (1982). *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara*. Translation by D. Noer. Jakarta: Rajawali.
- Horikoshi, H., & Wahid, A. (1987). *Kyai dan perubahan sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Kartodirdjo, A. S. (1969). *Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Leirissa, R. Z. (1996). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan sekitar Laut Seram awal abad 19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leonard, B. (1988). *Persekutuan Aneh Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC (Translated)*. Jakarta: Pustazet Perkasa.
- Leur, J. V. (1955). *Indonesian trade and society: Essays in Asian social and economic history*. Bandung: W. Van Hoeve.
- Milner, A. C. (1982). *Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule (No. 40)*. University of Arizona Press.
- Ongkhokham. (2003). *The Thugs, the Curtain Thief, and the Sugar Lord. Power, Politics and Culture in Colonial Java*. Jakarta: Metaphor Publishing.
- Poloma, M. M. (2005). *Contemporary sociological theory*. Translation by the Yasogama Team. 5th Edition. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Purwanti, R. (2002). *Penguburan Masa Prasejarah Situs Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan*. *Berita Penelitian Arkeologi*, (7).
- Purwanti, R. (2004). *Perubahan Pola Permukiman Masyarakat Palembang dalam Persepektif Arkeo-Ekologi*. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 1(1).
- Rahim, H. H. (1998). *Sistem otoritas dan administrasi Islam di Palembang: studi tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Resink, G. J. (1987). *Raja dan kerajaan yang merdeka di Indonesia, 1850-1910: enam tulisan terilih*. Djambatan.
- Ricklefs, M. C. (1990). *Sejarah Indonesia Modern*. Translation by D. Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prenada Media, 121.

- Saleh (1999). Mitos dan Legenda dalam Konsep Kerajaan dan Kenegaraan Melayu Tradisional. In Hashim, H. W. T., & Perret, D. (1999). Di sekitar konsep negeri. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.
- Sevenhoven, J. V. (1971). Lukisan Tentang Ibukota Palembang. Jakarta: Bhratara.
- Siregar, Rahmawaty. (2004). Menelusuri pewaris tahta Kesultanan Palembang Darussalam. Skripsi. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Raden Fatah Palembang.
- Soekanto, S. (1986). *Talcott Parsons: Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sturler, W. L. (1943). Proeve eener beschrijving van het gebied van Palembang, (Zuid-Oostelijk gedeelte van Sumatra. Groningen: Oohmens.
- Sutopo, H. B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University.
- Syamsudin, M. D. (2001). Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Van den Berg, L. W. C. (1989). Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara (Vol. 3). Translation by Rahayu Hidayat. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Weber, M. (2009). *The theory of social and economic organization*. Simon and Schuster.
- Woelders, M. O. (1975). Het Sultanaat Palembang 1811-1825. 's-Gravenhage: Nijhoff.
- Zuhdi, S., Leisrissa, R., Said, M. D., & Ohorella, G. (1996). Kerajaan tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Tentang Penulis

1. **Mohammad Syawaludin**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
E-Mail: mohammadsyawaludin_uin@radenfatah.ac.id.
2. **Muhammad Sirajudin Fikri**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
E-Mail: muhsirajuddinfikri_uin@radenfatah.ac.id.
3. **Yulion Zalpa**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
E-Mail: yulionzalpa_uin@radenfatah.ac.id.